

EVALUASI GERAKAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) DI KELURAHAN SEI JANG KOTA TANJUNGPINANG

¹⁾. Sri Ambar Rinah

²⁾. Fitri dewi Wulandari

³⁾. Muhammad Prayoga

^{1), 2), 3)} Administrasi Publik STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang

Email: sriambarrinahok@gmail.com

Abstract

The Office of Women's Empowerment, Child Protection and Community Empowerment of Tanjungpinang City (DP3APM) and Sei Jang Village in an effort to prevent violence against children in Sei Jang Village by carrying out the PATBM Movement. The problem that often occurs in Sei Jang Village in carrying out the PATBM Program is that if there are PATBM Program activities they tend not to attend to carry out violence prevention activities against children, this can result in the PATBM program in Sei Jang Village not running well and smoothly.

The purpose of this study was to evaluate the PATBM movement in the Sei Jang sub-district, Tanjungpinang City. To find out the above, the researcher used the operational concept put forward by Stuffbeam, namely the CIPP (Context, Input, Process and Output) model. The population in this study were 52 employees of DP3APM Tanjungpinang City and 10 people involved in PATBM in Sei Jang Village, Tanjungpinang City and 2 people or parents who got activities in the PATBM program in Sei Jang Village. The research method used was descriptive research with evaluative approach. The evaluative approach was used to evaluate the Community-Based Integrated Child Protection Movement in Sei Jang Village, Tanjungpinang City. Techniques and Tools Data collection uses observation and interview techniques, while data analysis techniques use triangulation techniques, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. Based on the results of research on the evaluation of the PATBM Movement in the Kelurahan Sei Jang, Tanjungpinang City, the overall implementation has followed the applicable rules and regulations. However, PATBM and its activities are still not maximal in preventing violence against children. There are suggestions that can be conveyed, namely to increase activities in the PATBM Movement, namely with the aim that the community knows that violence against children is very dangerous for children, to carry out activities that can make people aware of the importance of preventing violence against children.

Keywords: *Evaluation, Child Protection Movement, Integrated, Community Based, PATBM*

Abstrak

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang (DP3APM) dan Kelurahan Sei Jang dalam upaya mencegah kekerasan pada anak di Kelurahan Sei Jang dengan melakukan Gerakan PATBM. Masalah yang sering terjadi di Kelurahan Sei Jang dalam melakukan Program PATBM ini adalah masyarakat yang jika ada kegiatan Program PATBM mereka cenderung tidak hadir untuk melaksanakan kegiatan pencegahan kekerasan pada anak, ini dapat mengakibatkan program PATBM di Kelurahan Sei Jang tidak berjalan dengan baik dan lancar.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Gerakan PATBM di kelurahan Sei Jang Kota Tanjungpinang. Untuk mengetahui hal diatas, peneliti menggunakan konsep operasional yang dikemukakan oleh Stufflebeam yaitu model CIPP (Context, Input, Process and Output). Populasi dalam penelitian ini adalah 52 pegawai DP3APM Kota Tanjungpinang dan 10 orang yang terlibat dalam PATBM di Kelurahan Sei Jang Kota Tanjungpinang dan 2 orang masyarakat atau orang tua yang mendapat kegiatan dalam program PATBM di Kelurahan Sei Jang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif pendekatan evaluative. Pendekatan evaluative digunakan untuk mengevaluasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kelurahan Sei Jang Kota Tanjungpinang. Teknik dan Alat Pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara, sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik triangulasi yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian tentang evaluasi Gerakan PATBM di kelurahan Sei Jang Kota Tanjungpinang ialah dalam keseluruhan pelaksanaannya sudah mengikuti ketentuan dan aturan yang berlaku. Tetapi PATBM dan kegiatannya yang dijalankan masih belum maksimal dalam mencegah kekerasan pada anak. Adapun saran yang dapat disampaikan yaitu meningkatkan kegiatan-kegiatan dalam Gerakan PATBM yaitu dengan tujuan agar masyarakat tahu bahwa kekerasan pada anak sangat berbahaya bagi anak, melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menyadarkan masyarakat betapa pentingnya mencegah kekerasan pada anak.

Kata Kunci : Evaluasi, Gerakan Perlindungan Anak, Terpadu, Berbasis Masyarakat, PATBM

PENDAHULUAN

Anak adalah korban yang sering mendapat pelanggaran HAM, anak harus dijaga kehormatannya, dilindungi martabatnya serta harga dirinya yang harus dijaga dengan bijak baik itu menurut budaya, politik, sosial, budaya, ekonomi dan hukum, tidak membedakan golongan, ras dan agama. Hak Asasi Anak adalah salah satu dari hak asasi manusia dan terkandung di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Berdasarkan itu, bagian b menyebutkan yaitu “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi seperti yang ada pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada Undang-Undang tersebut pasal 1 ayat (satu) dijelaskan yaitu “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan”. Pelanggaran HAM sering terjadi serta dialami oleh anak adalah kekerasan. Kekerasan pada anak melanggar Hak Asasi Anak, dimana Hak Anak agar tidak mendapatkan perlakuan kejam telah dilanggar dan bisa mengakibatkan trauma bagi korban. Pemerintah sendiri sudah membuat peraturan agar bisa menjaga anak

yang mendapat kekerasan atau perlakuan tidak menyenangkan. Pedoman PATBM tahun 2016 oleh Kemenppa bahwa Pemerintah Indonesia melalui Kemenppa membuat strategi PATBM, dan merupakan gerakan perlindungan anak yang dilakukan sekelompok masyarakat yang ada di wilayah (desa/kelurahan).

PATBM merupakan program pemberdayaan yang digagasi oleh Kemenppa dari pemerintah pusat agar gerakan yang melibatkan masyarakat dan kemitraan pemerintah dalam perlindungan anak bisa lebih kuat. Pedoman ini menjadi pegangan penugasan DP3APM dan Kelurahan Sei Jang untuk melaksanakan PATBM di Kelurahan Sei Jang. Implementasi PATBM di Kelurahan Sei Jang Kota Tanjungpinang berjalan cukup baik, tetapi menurut Kelurahan Sei Jang ada beberapa masyarakat yang tidak peduli dengan adanya PATBM ini, dikarenakan Program PATBM ini melibatkan masyarakat untuk menjalankan kegiatan-kegiatan pencegahannya. Masalah yang sering terjadi di Kelurahan Sei Jang dalam melakukan Program PATBM ini adalah masyarakat yang jika ada kegiatan Program PATBM mereka cenderung tidak hadir untuk melaksanakan kegiatan pencegahan kekerasan pada anak, ini dapat mengakibatkan program PATBM di Kelurahan Sei Jang tidak berjalan dengan baik dan lancar. Henny Hadiyanti Tahun 2018 ditemukan bahwa pelaksanaan gerakan PATBM, sumber daya manusia menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan gerakan PATBM, dikarenakan aktivis yang tergabung didalam PATBM adalah masyarakat yang tergabung dalam organisasi lain, jika ada kegiatan PATBM sering terjadi tumpang tindih dengan kegiatan organisasi lainnya. Sementara dalam sumberdaya anggaran masih bisa terpenuhi walaupun jumlahnya relatif kecil.

Tidak Hanya itu, Mita Sari Wahyu tahun 2018, ditemukan bahwa implementasi gerakan PATBM di Kota Palangkaraya oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kota Palangkaraya ditemukan bahwa gerakan PATBM telah berjalan, tepat sasaran, gerakan PATBM ini bermanfaat dan diterima di Kota Palangkaraya. Selama dilaksanakan gerakan PATBM ini, telah terjadi penurunan angka kekerasan, Sumber Daya Implementasi Program PATBM baik dilihat dari sisi sumber daya manusia dan anggaran masih kurang dan belum memadai. Berdasarkan uraian-uraian yang telah

dikemukakan, menarik untuk dikaji tentang Evaluasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat.

Berbeda dari penelitian terdahulu yang sudah membahas implementasi gerakan PATBM, disini peneliti mencoba mengkaji evaluasi Gerakan PATBM setelah mengimplementasikan Gerakan PATBM. Dari permasalahan diatas, peneliti merasa penting untuk meneliti tentang evaluasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Di Kelurahan Sei Jang Kota Tanjungpinang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Di Kelurahan Sei Jang Kota Tanjungpinang.

KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan Publik Menurut Freidrich dalam Hamdi (2014:36) melihat kebijakan merupakan tindakan yang disarankan mengenai kelompok dan perorangan di lingkungan tertentu yang isinya kesempatan dan hambatan untuk dimanfaatkan dan diatasi melewati kebijakan yang disarankan untuk mencapai tujuan serta mewujudkan maksud tertentu.

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi Menurut Winarno (2014:228-229) penilaian atau evaluasi suatu kebijakan merupakan langkah terakhir dalam tahap-tahap proses kebijakan. Sebagai kegiatan yang fungsional yaitu kegiatan yang tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja namun pada semua proses kebijakan publik mulai dari perumusan masalah, program-program yang dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah, implementasi, hingga dampak kebijakan, evaluasi adalah kegiatan penilaian kebijakan yang bertujuan untuk melihat apa yang menjadi sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk melihat apakah kebijakan publik tersebut telah mencapai dampak yang diharapkan.

William and Dunn dalam Winarno (2012 :35) menyebutkan tahapan-tahapa kebijakan publik yaitu:

a. Tahap Penyusunan agenda

Pelaku Kebijakan dipilih serta diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk kedalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap formulasi kebijakan

Pemecahan masalah berasal dari berbagai alternative atau pun pilihan kebijakan yang ada, dalam tahap ini masing-masing alternatif atau pilihan kebijakan yang ada dalam tahap ini masing-masing alternatif kebijakan bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

c. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan pada akhirnya salah satu alternative kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsesus atau direktur lembaga atau keputusan peradilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternative pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah.

Dalam Subarsono (2013:126) untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator. Berikut ini indikator atau kriteria evaluasi menurut Dunn antara lain:

1) Efektifitas

Yaitu berkenaan dengan apakah program/kebijakan tersebut mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Efektifitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unti produk atau layanan atau nilai moneter.

2) Efisiensi

Yaitu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.

3) Kecukupan

Yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

4) Perataan

Yaitu kebijakan/program tersebut dilaksanakan merata serta terpenuhinya seluruh kebutuhan.

5) Responsifitas

Yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan preferensi atau nilai masyarakat tertentu. Pentingnya kriteria ini adalah karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

6) Ketepatan

Yaitu Suatu hasil pelaksanaan yang dilihat dari kesesuaian biaya dengan standard dan bentuk surat pertanggungjawaban yang sesuai dengan ketentuan.

Menurut Arikunto (2010: 45-48) menjelaskan evaluasi CIPP yang dikemukakan oleh Stuffbeam dan Shinkfield adalah sebuah pendekatan evaluasi yang berorientasi pada pengambilan keputusan untuk memberikan bantuan kepada administrator atau leader pengambil keputusan. Stuffbeam mengemukakan bahwa hasil evaluasi akan memberikan alternatif pemecahan masalah bagi para pengambil keputusan.

Model evaluasi CIPP ini terdiri dari 4 huruf yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Context : latar belakang atau situasi yang mempengaruhi perencanaan program.
- b. Input : kualitas masukan yang dapat menunjang ketercapaian program.
- c. Process : menjalankan program dan menggunakan fasilitas sesuai apa yang telah direncanakan.
- d. Product : hasil yang diperoleh dalam menjalankan program.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan di penelitian ini, yaitu jenis penelitian deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian dilakukan di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau Kota Tanjungpinang tepatnya di Kelurahan Sei Jang. Alasan peneliti mengambil penelitian disini adalah Kelurahan Sei Jang karena Kelurahan Sei Jang merupakan salah satu yang menjalankan (PATBM) dan merupakan Kelurahan yang mengalami jumlah kekerasan terhadap anak tertinggi di Kota Tanjungpinang pada tahun 2020 yang artinya di Kelurahan Sei Jang masih banyak terjadi kekerasan anak. Populasi dalam penelitian ini adalah Lurah Kelurahan Sei Jang, 10 orang yang terlibat dalam Program PATBM meliputi Ketua PATBM, Fasilitator PATBM, dan Aktivis PATBM yang ada di Kelurahan Sei Jang, dan 52 Pegawai DP3APM Kota tanjungpinag, dan 2 orang masyarakat ibu rumah tangga yang mendapat kegiatan dalam Gerakan PATBM. Sampel Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel yaitu, key informan DP3APM dibidang perlindungan anak berjumlah 2 orang, Lurah Kelurahan Sei Jang Berjumlah 1 orang, Pegawai Kelurahan Sei Jang dibidang Sekretariat, bidang pemerintahan dan pelayanan publik yang terlibat di PATBM berjumlah 3 orang dan 3 orang masyarakat yang menjadi aktivis PATBM di Kelurahan Sei Jang , masyarakat Sei Jang yang mendapat kegiatan dalam gerakan PATBM berjumlah 2 orang yang berstatus sebagai ibu rumah tangga dan wirausaha. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer melalui Wawancara baik melalui responden ataupun informan kunci dan data sekunder melalui media yang melengkapi data primer seperti koran, jurnal ilmiah, literatur, program kerja serta struktur birokrasi yang terkait dan majalah yang terkait erat dengan penelitian ini. Alat

Pengumpulan Data yang digunakan yaitu Observasi terstruktur dan Wawancara, serta Dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Evaluasi Konteks

Evaluasi Konteks Evaluasi konteks ini menentukan kebutuhan, membantu merencanakan keputusan agar bisa dicapai oleh kegiatan atau program dan merumuskan tujuan kegiatan atau program. Evaluasi konteks melihat dengan uji, apakah tujuan yang telah dibuat dan dirumuskan dengan spesifik dan jelas atau tidak.

a. Dasar Hukum

Dasar hokum yang Mengatur Dari Gerakan PATBM Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berperan sebagai strategis dalam mendukung peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari hasil pengamatan dan observasi dan wawancara yang didapatkan dilapangan, untuk sub indikator Dasar Hukum yang mengatur dari Gerakan PATBM, pihak yang menjalankan yaitu dari DP3APM dan Kelurahan Sei Jang sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mengikuti aturan yang sudah dibuat dan ditetapkan Kemenpppa. Jadi, Dasar Hukum untuk mengatur tentang Gerakan PATBM ini, sudah dilaksanakan pegawai DP3APM dan Kelurahan Sei Jang dengan aturan yang ada untuk mencapai tujuan.

b. Tujuan

Tujuan Dari Gerakan PATBM Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dilapangan untuk sub indikator perumusan tujuan, dalam hal ini sebelum optimalnya tujuan yang akan dicapai diakibatkan oleh kurangnya kesadaran bagi pelaku kekerasan pada anak dan kesadaran masyarakat betapa pentingnya untuk mencegah kekerasan pada anak, maka dari itu perlu pekerjaan yang keras bagi DP3APM dan Kelurahan Sei Jang dalam melakukan berbagai kegiatan dan

sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat betapa pentingnya mencegah kekerasan pada anak supaya bisa lebih menekankan lagi angka kekerasan pada anak dan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

2. Evaluasi Input

Evaluasi ini erat terkait seperti masukan agar memperoleh tujuan belum memadai atau sudah cukup memadai, serta bagaimana kualitas dan prosesnya. Selain itu di evaluasi ini lebih melihat dari pembiayaan dan sumber daya untuk pencapaian program.

a. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dalam melaksanakan Gerakan PATBM Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan dalam melakukan kegiatan di gerakan PATBM ini. PATBM di Kelurahan Sei Jang memiliki sebuah gedung yang memang digunakan untuk kegiatan-kegiatan dalam gerakan PATBM. Sarana ini adalah salah satu alat untuk membantu menjalani program agar mempermudah para aktivis PATBM di Kelurahan Sei Jang untuk bergerak. Selain itu ada juga prasarana yang mendukung gerakan PATBM ini yaitu microphone dan speaker atau pengeras suara. Dengan adanya prasarana ini, dapat mendukung pencapaian dari gerakan PATBM ini.

b. Anggaran

Anggaran Dalam Melakukan Gerakan PATBM Anggaran sebesar 12 juta tersebut meliputi Hadiah untuk lomba kampanye stop kekerasan pada anak, konsumsi mereka, honor aktivis PATBM, Honor narasumber yang memberikan sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat. DP3APM dan Kelurahan Sei Jang juga transparan dengan rincian dari anggaran untuk menjalankan kegiatan dalam gerakan PATBM ini, sehingga masyarakat percaya dan menyerahkan semuanya kepada yang menjalankan gerakan PATBM ini.

c. Kesiapan tenaga Pelaksana

Kesiapan tenaga pelaksana yang ikut Serta dalam Gerakan PATBM Dari hasil wawancara, bahwa setiap Kelurahan khususnya kelurahan Sei Jang harus

mengikuti dan sudah mendapatkan sosialisasi dan pelatihan dari DP3APM. Dimana para aktivis PATBM ini harus paham dengan Undang-undang yang melahirkan program PATBM, dan aturan-aturan dan pedoman yang mengatur tentang PATBM. Dengan adanya pelatihan dan sosialisasi yang telah diberikan tentang PATBM, maka akan membuat para aktivis PATBM melaksanakan dengan benar tanpa menyalahgunakan wewenangnya sebagai yang menjalankan program. Masyarakat juga bisa memahami bahwa tenaga pelaksana Gerakan PATBM ini sangat mengerti dan bertanggung jawab untuk melaksanakan Gerakan PATBM.

3. Evaluasi Proses

Evaluasi proses terkait dengan kegiatan dalam melaksanakan rencana program dengan input yang telah disediakan.

a. Kegiatan-kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya untuk mencegah kekerasan pada anak kegiatan yang dilakukan oleh aktivis PATBM Kelurahan Sei Jang yang dimana Ketua dan aktivis PATBM mendatangi rumah masyarakat Sei Jang untuk memberikan pemahaman, sosialisasi dan berdiskusi dengan masyarakat setempat terkait dengan pencegahan kekerasan pada anak dan materi yang disampaikan yaitu berupa cara mencegah kekerasan pada anak dengan memberikan perhatian penuh pada anak dan selalu waspada dengan kekerasan pada anak sehingga keselamatan anak untuk tidak mendapatkan kekerasan pun bisa dicegah. kegiatan yang dijalankan aktivis PATBM Kelurahan Sei jang yaitu dengan menggelar kampanye stop kekerasan pada anak yang diikuti oleh anak-anak yang ada dikelurahan Sei Jang yang dilakukan di aula atau gedung yang ada dikelurahan Sei Jang. Materi yang disampaikan kepada anak-anak sangat mudah dipahami oleh anak-anak yaitu cara mencegah kekerasan pada anak dengan mereka mematuhi orang tua mereka, selalu beribadah, dan melaporkan kepada orang tua jika ada kekerasan pada mereka atau mereka melihat kekerasan yang terjadi dilingkungan mereka.

b. Keterlibatan Instansi Lain

Keterlibatan instansi lain dalam Melakukan Gerakan PATBM selain DP3APM dan Kelurahan Sei Jang ada juga terlibat instansi lain yaitu Forum Anak Kota Tanjungpinang dan P2TP2A, kedua instansi ini terlibat dalam setiap kegiatan PATBM di kelurahan Sei Jang yaitu kegiatan sosialisasi, diskusi dan kampanye stop kekerasan pada anak, kedua instansi ini berperan sebagai pengawas dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi, diskusi dan kampanye stop kekerasan pada anak, dan memastikan kegiatan ini berjalan dengan baik dan tidak ada hambatan, kedua instansi ini berpengaruh dalam melaksanakan gerakan PATBM di Kelurahan Sei Jang.

c. Hambatan-hambatan

Hambatan dalam Menjalankan Gerakan PATBM Ada faktor yang mungkin menjadi penghambat untuk menjalankan program ini. Karena kita tahu bersama, bahwa adanya kerjasama yang terlibat antara pemerintah dan masyarakat tentunya akan berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program tersebut. Dalam menjalankan gerakan PATBM ini, DP3APM dan Kelurahan Sei Jang sudah bekerja dengan baik, tetapi masih terjadi kekurangan yaitu kurang bekerja sama dengan masyarakat. Maksudnya disini, ada masyarakat yang masih kurang peduli dan acuh terhadap program ini. Padahal program ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak tentunya, dan bisa melindungi anak dari kekerasan.

4. Evaluasi Produk/Hasil Evaluasi hasil

Evaluasi produk erat kaitannya dengan evaluasi kepada hasil yang dicapai dari suatu kebijakan atau program sehingga dapat menentukan keputusan apa yang akan dilaksanakan selanjutnya untuk tercapainya tujuan dari program yang telah ditetapkan

a. Pencapaian Setelah Melakukan Gerakan PATBM

Berdasarkan hasil observasi dilapangan dan hasil wawancara yang didapatkan, untuk sub indikator diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan dari gerakan PATBM ini, sudah terealisasi tetapi belum optimal, dikarenakan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kekerasan pada anak sehingga bisa mengakibatkan kekerasan pada anak terjadi dan meningkat lagi.

b. Dampak Dari Pelaksanaan Gerakan PATBM

Hasil dari Gerakan PATBM yang telah dicapai setiap tahunnya masih mengalami turun naiknya angka kekerasan pada anak. Tentunya menjadi pekerjaan yang sangat berat bagi DP3APM dan Kelurahan Sei Jang selaku pelaksana dari gerakan PATBM ini. Selain itu, masih kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kekerasan pada anak walaupun sudah ada gerakan PATBM ini. Kerjasama antara masyarakat dan pemerintah harus lebih ditingkatkan lagi agar tujuan dari gerakan PATBM ini bisa tercapai.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang evaluasi penyelenggaraan perlindungan anak melalui program Perlindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam penelitian Gerakan PATBM yang dijalankan oleh DP3APM dan Kelurahan Sei Jang sudah mengikuti aturan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai dasar hukum dari Program PATBM. Tetapi masih belum maksimal dikarenakan ada masyarakat Kelurahan Sei Jang yang belum mempunyai rasa kesadaran dan kepedulian terhadap keselamatan anak yang bisa mengakibatkan kekerasan pada anak bisa terjadi, dari sinilah PATBM Kelurahan Sei Jang harus mempunyai kepedulian yang tinggi untuk menyadarkan masyarakat Kelurahan Sei Jang yang belum sadar dan peduli terhadap keselamatan anak dari kekerasan. Selain itu, DP3APM dan Kelurahan Sei Jang dalam pelaksanaan Gerakan PATBM dari Kemenpppa ini, sangat antusias dan rasa peduli yang tinggi untuk mencegah kekerasan pada anak, terutama di Kelurahan Sei Jang dikarenakan kekerasan pada

anak ini sangat berbahaya bagi anak dan mempunyai dampak yang buruk bagi anak, dan masa depan anak-anak di kelurahan Sei Jang harus dilindungi.

b. Saran

Adapun Saran yang dapat diberikan Sebagai Berikut:

1. Meningkatkan kegiatan-kegiatan dalam PATBM yaitu dengan tujuan agar masyarakat tahu bahwa kekerasan pada anak sangat berbahaya untuk anak itu sendiri.
2. Melakukan kegiatan-kegiatan yang mudah dipahami kepada masyarakat agar masyarakat mengerti dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat supaya lebih peduli lagi terhadap anak agar tidak mendapatkan kekerasan khususnya untuk aktivis PATBM di Kelurahan Sei Jang dan DP3APM.
4. Meningkatkan kegiatan-kegiatan dalam PATBM seperti sosialisasi dan diskusi kepada masyarakat yang dapat menyadarkan masyarakat yang masih kurang peduli terhadap kekerasan pada anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharmi (2010). Evaluasi Program Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara
- Hamdi, Muchlis. (2014). Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi. Cetakan Kesatu. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Henny Hadiyanti. 2018. Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Di Kabupaten Bandung Barat. Thesis: Universitas Pasundan.
- Mita Sari. 2018. Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Di Kota Palangkaraya. Jurnal: Universitas Palangkaraya
- Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Tahun 2016
- Subarsono. (2013). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Winarno, Budi. (2012). Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus Yogyakarta. CAPS.

Winarno, Budi. (2014). Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus. Cetakan Kedua, Yogyakarta: CAPS.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.